

AFILIASI GERAKAN ISLAM POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Rendy Adiwilaga¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
 Founder Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Enviro
rendyadiwilaga@gmail.com
rendyadiwilaga@unibba.ac.id

ABSTRAK

Pasca reformasi, dinamika perkembangan gerakan islam politik, baik itu kelompok Islamisme arus utama maupun arus militan, berlangsung amat sangat pesat pasca dibukanya keran kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Beberapa kelompok yang sebelumnya telah tumbuh seperti Hizbut Tahrir dan kelompok tarbiyah di dewan pengurus masjid kampus-kampus besar, serta beberapa kelompok Islam lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas baru lainnya jelas semakin muncul ke permukaan. Beberapa diantaranya bahkan berkontribusi langsung dalam proses *agenda setting* maupun formulasi-formulasi kebijakan. Hanya yang perlu diperhatikan dari kesemuanya adalah, masing-masing organisasi memiliki corak perbedaan warna gerakan yang cukup beragam, sehingga para peneliti berhati-hati dalam menggeneralisir kelompok Islamisme. Tulisan ini mencoba mengelaborasi referensi-referensi atau afiliasi kelompok-kelompok Islamis di Indonesia, seperti halnya kelompok Tarbiyah yang direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), serta *fusion* dari keempat Lembaga tersebut yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Kesemuanya kemudian akan dikomparasikan dengan agenda gerakan ormas arus utama seperti halnya Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dimana dari simpulan keseluruhan, penulis menyatakan bahwa pasca *arab springs* dan krisis Turki, gerakan Islam politik perlu mencari jatidiri asli kelompok islamis nusantara yang sedianya telah dijalankan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Keywords: Islamisme, Gerakan Islam Politik, Arab Spring

¹ Penulis merupakan Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung (UNIBBA) dan memiliki konsentrasi keilmuan pada diskursus-diskursus Politik Islam, Feminisme, Filsafat Pancasila dan Gerakan Sosial. Serta saat ini aktif menjadi dosen pada mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, Pancasila, Analisis Kekuatan Politik Indonesia, Kepemimpinan Pemerintahan, serta Teori dan Filsafat Politik

PENDAHULUAN

Kelompok Islam saat ini dinilai oleh para sarjana dan peneliti-peneliti politik kontemporer memiliki daya tawar yang cukup kuat dan menjual dalam suatu kontestasi politik sebagai produk demokrasi elektoral. Hal ini sendiri dibuktikan dari bagaimana pemilihan presiden tahun 2019. Kedua calon berupaya semaksimal mungkin merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan kelompok Islam. Hal ini jelas bukan tanpa perhitungan yang matang, pemilihan wapres yang diusung oleh dua kubu nyatanya cukup mempengaruhi suara para calon dan kontribusi kelompok Islam, baik dari kelompok moderat maupun militan, sama-sama menentukan perolehan suara.

Data dari Charta Politika² membuktikan pilihan politis dari kedua calon. Kubu petahana yang menggaet suara ulama dan santri Nahdhatul Ulama (NU) dengan memplot Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, nyatanya mampu menyaring 66,16% suara (versi hitung cepat) masyarakat Jawa Timur sebagai "sentra santri nasional" dan basis NU. Jumlah suara tersebut, -disamping meledaknya suara petahana di Jateng dan Bali- secara langsung memutarbalikkan perolehan suara petahana, yang padahal secara kuantitas jika dihitung dari jumlah propinsi, petahana kalah jumlah dari kubu penantang.

Hal menarik juga dapat kita lihat pada kantung-kantung suara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berdasarkan

data Poltracking³, Pasangan nomor urut 02 berhasil merebut suara di daerah-daerah yang memiliki karakteristik masyarakat islami yang kental seperti halnya Aceh (87.02%), Sumatera Barat (87.91%), Banten (64.02%), Jawa Barat (58.06%, Charta Politika), dan Nusa Tenggara Barat (68.35%). Tanpa mengesampingkan peran dari masyarakat Indonesia yang tidak memeluk agama Islam, secara garis besar kemudian dapat disimpulkan secara kasar bahwa kubu 02 berhasil merebut perhatian pemilih muslim di luar kelompok NU⁴ yang mengklaim memiliki jumlah anggota sebesar kurang lebih 80-130 juta jiwa⁵.

Artinya, kelompok Islam dalam kontestasi politik dewasa ini benar-benar menjadi sebuah *infinity stones* yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang bergelut dalam politik praktis kontemporer. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian ialah, apakah kelompok Islam, baik dahulu hingga saat ini, hanya menjadi sekedar objek berupa permadani terbang yang mampu melambungkan suara penunggangnya, atau malah melalui titik balik pemilihan umum

³<https://poltracking.com/5-lambung-suara-terbesar-jokowi-dan-prabowo-versi-quick-count-poltracking.html>. Diakses pada 30 April 2019.

⁴ Klaim tersebut penulis ambil dari pengamatan sementara penulis yang menilai bahwa kelompok Islam di luar NU yang bahkan secara ideologis berseberangan dengan NU seperti halnya PKS, HTI, bahkan sebagian besar dari FPI, berada satu barisan dalam deklarasi untuk mendukung kubu 02 sebagai presiden.

⁵dalam buku "NU dan Keindonesiaan" karya Mohammad Sobary (2010: 107) menyebutkan bahwa KH. Hasyim Muzadi pernah menyatakan jumlah warga NU sekitar 60 juta. Akan tetapi, Gus Dur menaksir lebih banyak; lebih dari 50 persen orang Indonesia adalah warga NU. Jadi sekitar 120 juta. Survey IndoBarometer menyebutkan sekitar 75 persen mengaku warga nahdliyin. Artinya jumlah warga NU sekitar 143 juta tahun 2000². Survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan warga yang teridentifikasi Nahdhatul Ulama (NU) 36,5%, sedangkan Muhammadiyah hanya 5,4%

²<https://news.detik.com/berita/d-4528461/peta-jokowi-vs-prabowo-di-34-provinsi-versi-qc-charta-politika>. Diakses pada 30 April 2019.

ini kemudian menjadi subjek yang kelak menjadi *kingmaker* dalam penentuan keputusan strategis negara? Dan yang paling utama dalam diskursus tulisan ini ialah, dinamika kelompok Islam dalam skala general mana yang paling tepat untuk dijadikan *role model* oleh kelompok Islamis Indonesia guna mencapai setinggi-tingginya kemakmuran bangsa yang adil dan maju?

PEMBAHASAN

Menakar Pemikiran Politik Islam Indonesia

Pada dasarnya, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara, hingga detik ini masih menjadi sebuah diskursus yang hangat di kalangan para ahli. Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga aliran pemikiran tentang hubungan agama dan negara (Syadzali, 1993: 1-2). Aliran pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini yaitu Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan yang paling vokal adalah Abu al-A'la al-Maududi.

Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah Ali Abd Raziq, dan Thaha Husein.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Aliran ini

berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Karena itu, dalam bernegara umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam. Tokoh yang termasyhur dalam aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal.

Yang perlu digarisbawahi yakni ialah, secara historis, perkembangan aliran pemikiran Islam di Indonesia pra-kemerdekaan mengacu pada aliran pertama dan aliran ketiga. Aliran pertama tergambar dalam narasi kehidupan beragama di Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Fanatisme terhadap agama kemudian merasuk menjadi sebuah doktrin politik sehingga mampu memancing gelora perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Snouck Hurgronje, salah satu pemikir sosiolog paling mutakhir di masanya, kemudian mencoba mengelaborasi pemikiran Islam yang ada di lokus kajian penelitiannya yakni Aceh, menurutnya, orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Menghadapi medan seperti ini, Hurgronje membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam sebagai “kekuatan politik”. analisa Hurgronje cukup beralasan, mengingat pemerintah kolonial pada saat itu disibukkan oleh perang Aceh, perang Padri dan Perang Diponegoro yang

hampir menguras habis kas kerajaan Belanda (Suminto, 1996: 112-114).

Seiring meletupnya konsepsi Pan-Islamisme di tataran global, gerakan pembaruan pemikiran Islam yang lebih moderat mulai muncul di Nusantara pasca kelahiran Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama (1926), sedangkan secara politis ditandai dengan kelahiran Syarikat Islam (SI). Namun sebelum lebih jauh pada dinamika politik Islam tersebut, perlu diperhatikan bahwa masuknya Islam pertama kali di bumi Nusantara juga dapat menjadi jawaban mengapa aliran ketiga yang diutarakan Syadzali amat pesat perkembangannya.

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pada awalnya Islam di masa Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin* mengenal tradisi ilmiah, namun saat datang ke Indonesia bertransformasi menjadi islam yang normatif, hal ini dikarenakan *pertama*, jarak Indonesia dengan pusat Islam (Arab) terlalu jauh, *kedua*, Islam sampai ke Indonesia ini adalah islam yang kosmopolitan, di mana hubungan antar pemeluk Islam sedunia begitu dekat. *Ketiga*, Islam di Indonesia menjadi Islam pedesaan dan menjadi islam petani. Pedagang timur tengah yang sebelumnya cukup *mobile*, sesampainya di Indonesia menurun mobilitasnya dan tercampur budaya agraris yang relatif statis dan percaya mistik (Kuntowijoyo, 2017: 39-40). Kelompok Islam yang dominan inilah yang kemudian menginisiasi lahirnya kelompok santri NU dan perkembangannya sangat pesat bahkan hingga saat ini. Adapun, aliran kedua baru berkembang pasca reformasi, yakni pasca bangkitnya Islam liberal.

SI sebagai pionir pergerakan organisasi Islam, pada prosesnya kemudian melahirkan turunan-turunannya yang kelak menjadi gerakan politik yang cukup berpengaruh seperti halnya

Masyumi (Kartosoewirjo pernah aktif di dalamnya hingga kemudian membentuk DI/TII), hingga Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diinisiasi dari kelompok SI Merah pimpinan Semaun, Alimin, Darsono, dkk. Dari SI, kita bisa menyaksikan bahwa gerakan Islam kemudian di era pasca kemerdekaan, -berdampingan dengan NU sebagai partai-kemudian hadir sebagai salah satu kelompok yang paling berpengaruh, sampai kemudian pecah pemberontakan-pemberontakan yang mengkerdilkan kekuatan Islam serta kebangkitan Orde Baru yang semakin merajam potensi kelompok Islam.

Arab Spring dan Krisis Identitas Islam Politik Global

Setelah meredupnya dinamika islam politik di Indonesia di bawah rezim Orde Baru dan awal reformasi, medio 2010 dunia dibuat terhenyak dengan rentetan peristiwa yang dikenal sebagai musim semi Arab (*arab spring*).

Berdasarkan paparan Zulkarnen (2017: 72-73) *Arab Spring* merupakan fenomena yang timbul dari sebuah dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara yang berupa gelombang protes atau bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut yang dimulai dari Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali (Ben Ali), kemudian merambat ke Mesir yang melengserkan Hosni Mubarak, terus menyeberang ke Libya, yang mengakhiri pemerintahan Moammar Khadafi yang kepemimpinannya sudah berlangsung kurang lebih selama 40 tahun.

Selain Tunisia, Libya, dan Mesir, negara lain seperti halnya Maroko juga mengalami imbas yang sama, Maroko

terpaksa melakukan pemilu multipartai pertamanya pada tanggal 27 November 2011. Sementara itu, negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman dengan pendekatan kesejahteraan (*welfare state*) berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik (Muttaqien, 2015: 262).

Efek domino semakin melebar bahkan hingga Yaman (aliansi Houthi dan mantan Presiden Abdullah Saleh melawan Presiden Hadi yang didukung Arab Saudi), hingga Suriah yang kita kenal memiliki eskalasi konflik yang kompleks karena melibatkan banyak pihak baik internal (rezim Assad, kelompok mayoritas Sunni, dll) maupun eksternal (Hizbullah, Turki, Iran, Rusia, AS, dll) hingga hadir “penantang” lainnya yang tak kalah memusingkan seperti halnya *Islamic State of Iraq and Sjam* (ISIS). Musim semi arab menjadi catatan yang sangat penting khususnya guna mengevaluasi posisi negara-negara arab dalam mempromosikan Islam sebagai ornamen penting dalam struktur ketatanegaraan.

Tidak hanya *arab spring*, Turki, yang didaulat oleh kelompok Tarbiyah di Indonesia sebagai *role model* atau referensi utama dalam penegakan Islam dalam sendi negara, dewasa ini juga tak luput dari kudeta dan krisis. 15 Juli 2016, Turki mengalami upaya kudeta terhadap presiden Erdogan yang diduga dilakukan oleh ulama kharismatik Fethullah Gulen. Kudeta gagal, namun Erdogan melakukan pembersihan besar-besaran untuk kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya kembali. Konflik antara sesama kelompok santri tersebut, menurut paparan Buya Syafii Maarif, sangatlah melelahkan dan sangat melemahkan posisi Turki dalam percaturan politik global (Maarif, 2018: 69).

Abou El-Fadl (Maarif, 2018: 160), salah satu pemikir Islam asal Kuwait,

memaparkan bahwa “kegagalan musim semi arab mendorong banyak politisi dan intelektual di Barat dan di dunia Arab menarik napas lega, karena bahaya dari apa yang disebut sebagai Islam Politik telah dicegah. Dan memang, begitu banyak kelompok terpelajar bersukaria menyatakan bahwa gejala Islam Politik pada akhirnya akan mati”. Pendapat tersebut dibuktikan dari bagaimana presiden Mesir yang berhasil mengukudeta kekuasaan Ikhwanul Muslimin pimpinan Mursi, Jenderal Abdel Fattah El-Sisi, menggunakan ulama sebagai kekuatan pembenar terhadap kebijakan politik kekuasaan yang diambil. El Sisi bahkan secara terang-terangan menyamakan Islam politik dengan apa yang disebut sebagai terorisme.

Arab Saudi dan Kuwait bahkan dianggap mengeksploitasi agama lebih jauh untuk kebijakan-kebijakan negara seperti halnya antagonisme dan sinisme terhadap Iran yang bercorak Syiah, serta sekutu-sekutu Syiah lainnya. Di sisi lain, Iran yang identik dengan Syiisme, malah membantu rezim Bashar Al-Assad bersama Rusia dimana mayoritas rakyat Suriah adalah penganut sunisme. Semakin paradoks lagi, semangat perlawanan satu sama lain tersebut berkontradiksi dengan nasib Palestina yang terus menerus digempur militer Israel, di mana Israel, merupakan karib erat dari Arab Saudi⁶.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat kita saksikan bersama kemudian bahwa negara-negara Arab pada akhirnya sibuk sendiri dengan kepentingan politik masing-masing. Hal ini tidak diimbangi dengan *euphoria* kebangkitan kelompok

⁶ Menurut survei terbaru dari IDI (Institute for Policy and Strategy), hanya 18% warga Arab Saudi yang menganggap Israel sebagai musuh, 22% menentang ISIS, dan 53% mengecam Iran. Artinya, ada perubahan besar di dalam negeri Arab Saudi. Mereka lebih benci terhadap Iran daripada Israel (World Affairs, 2017).

Islam di negara-negara timur jauh yang salah satunya ialah di Indonesia. Di mana pasca reformasi, kekuatan gerakan Islam mulai diperhitungkan. Adiwilaga (2017: 126) memaparkan bahwa gejolak euforia Islamisme sebagai paham, bahkan mimpi dalam sistem ketatanegaraan, sangat laris sebagai sebuah komoditas hangat terlebih untuk diperbincangkan. Hal ini ditandai oleh aksi massa dengan mengusung nama gerakan seperti 411 dan 212 pada akhir tahun 2016, sebagian besar masyarakat mulai memberi perhatian lebih pada gerakan Islamisme. Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendadak mendapatkan panggung megah, dan ormas-ormas lain sejenis pun semakin lantang dalam memperlihatkan geliatnya perihal ditetapkannya nilai-nilai khilafah dalam keseharian masyarakat.

Mencari *Role Model* yang Tepat untuk Gerakan Islam Politik Indonesia

Kebangkitan Islam Politik saat ini benar-benar sangat kentara diperlihatkan terlebih dalam proses Pemilihan Wakil Presiden pada pemilu 2019. Dua aliran utama dalam kontestasi politik Islam Nusantara, yakni kelompok yang diwakili oleh NU serta kelompok Islam yang berkoalisi dalam GNPF Ulama pasca aksi massa 212 masing-masing merapatkan diri pada barisan yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan kemudian ialah, sejauh mana bayangan masa depan kelompok Islam politik di Indonesia, apakah menuju pada perkembangan yang semakin baik dan dominan, atau kemudian kembali mengulang kekeliruan sejarah dan kesekian kalinya terpasung dalam jerat oligarki dan kapitalis.

Kekuatan besar yang pertama ialah kelompok alim ulama yang tergabung dalam GNPF Ulama, di mana di dalamnya terdapat sokongan kekuatan besar seperti halnya PKS dan juga HTI. Namun yang

penulis hendak cermati ialah manuver PKS dalam rangka penegakan Islamisme di Indonesia. Menurut Bubalo, Fealy dan Mason (2012: 47), PKS sendiri memiliki silsilah intelektual langsung dengan Al-Ikhwan al-Muslimun (Ikhwanul Muslimin) di Mesir. Walaupun tidak ada bukti kuat bahwa Ikhwan al-Muslimun Mesir berupaya mengontrol PKS langsung dari Kairo, namun ada indikasi bahwa PKS ikut serta secara teratur dalam pertemuan internasional antara Ikhwan Mesir senior dan perwakilan gerakan dan partai yang diilhami oleh Ikhwan (Bubalo, Fealy, & Mason, 2012: 64).

Dasar argumen tersebut berangkat dari kenyataan bahwa aktivisme Ikhwan baik masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan di akhir 1970, dilewati melalui tiga fase: penyebaran gagasan melalui publikasi, ceramah, dan seminar intelektual; aktivitas organisasi sosio-religius dalam bentuk gerakan Tarbiyah di kampus-kampus; dan terakhir aktivisme politik langsung pada tahun 1998, di mana gerakan mahasiswa KAMMI ikut andil dalam proses melengserkan Soeharto (Bubalo, Fealy, & Mason, 2012: 47). Bentuk gerakan tersebut serupa dan identik dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang bergerak melalui gerakan-gerakan Tarbiyah di kalangan terpelajar hingga kemudian berhasil menumbangkan Presiden Hosni Mubarak. Hanya saja, penerus Ikhwanul Muslimin di Asia Tenggara selangkah lebih dahulu dalam keberhasilannya menumbangkan *common enemy*, KAMMI, dengan salah satu tokohnya yang cukup terkenal hingga kini, yakni Fahri Hamzah, ikut berkontribusi dalam aksi massa 1998 sebagai upaya menumbangkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Seiring meredup dan terpasungnya geliat Ikhwanul Muslimin, PKS memperlihatkan manuver pragmatis nya

dengan beralih pada kedigdayaan *Adaley ve Kalkinma Partisi (AKP)* pimpinan Recep Tayyip Erdogan di Turki. PKS bahkan mengirimi ‘tim kajian’ ke Turki di awal 2008 untuk meneliti lebih lanjut strategi dan alasan kesuksesan AKP, walaupun pada kenyataannya, kontradiksi terjadi di mana AKP enggan berdiskusi dan berkolaborasi dengan partai lain non-sekuler (Bubalo, 2012: 66). Sayangnya kemudian, Turki tak terhindarkan dari krisis pasca adanya upaya penggulingan Erdogan oleh oposisi. Krisis Turki tersebut semakin membingungkan salah satu kelompok Islam di Indonesia, khususnya PKS.

Pun halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia⁷. Kampanye penegakan khilafah nya saat ini telah ditolak di berbagai belahan dunia hingga terakhir, Presiden Joko Widodo melarang organisasi tersebut secara resmi. Mesir dan Turki, sebagai negara-negara yang menjadi induk semang pergerakan PKS sebagai sekutu HTI di Indonesia, bahkan sudah jauh-jauh hari melarang Hizbut Tahrir. tak hanya itu, Rusia dan Jerman bahkan telah memutuskan melalui pengadilan bahwa HT merupakan organisasi teroris. Spanyol dan Prancis belum mengeluarkan keputusan tegas, hanya HT dianggap organisasi ilegal dan dalam pengawasan ketat. Terakhir, Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang Hizbut Tahrir beraktivitas di negaranya⁸.

Wacana-wacana penegakan khilafah dianggap oleh beberapa negara sebagai sebuah konsep yang usang. Pasalnya, referensi-referensi HTI saja

misalnya, berangkat dari utopia-utopia tentang bangkitnya kembali kejayaan Islam di masa-masa Umayyah dan Abbasiyah namun kemudian menampik fakta-fakta bahwa pergantian pucuk kepemimpinan dicapai dengan pertumpahan darah⁹. Sayangnya pula, pasca *arab spring*, kebangkitan nasionalisme di negara-negara Afrika bagian utara dan teluk Arab tengah memuncak. Wacana pan-islamisme seperti yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir pun kemudian berangsur-angsur meredup.

Namun, wacana utopia tersebut nampaknya masih laris di Indonesia. Pasca peristiwa pembakaran bendera tauhid oleh sekelompok santri di Garut, propaganda HTI sebagai *victim* dari peristiwa tersebut hingga detik ini mampu mempolarisasikan kelompok Islam menjadi dua kubu yang saling berlawanan, namun tanpa memberikan konklusi atau formula yang tepat bagi kehidupan bernegara selain wacana-wacana utopis yang membius (hanya) para pengikutnya.

FPI sendiri sebagai salah satu ormas yang cukup besar serta memiliki pemimpin kharismatik yang didewakan oleh para anggota GNPF-Ulama yakni Rizieq Shihab, saat ini pun masih mengalami kegamangan pasca “terisolir” nya Rizieq Shihab di Arab Saudi. FPI sendiri, menurut hemat penulis, merupakan kepanjangan tangan ideologis wahabisme¹⁰ Arab Saudi karena dari polarisasi gerakannya, kelompok FPI bersuara dan bahkan bersikap keras dalam penegakan syariat tanpa tedeng aling-aling. Tak ayal *sweeping* serta pencekalan hal-hal yang dinilai berlawanan dengan norma syariat,

⁷ Tentang HTI, dapat dilihat pada artikel dari Azman, “Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia”. Jurnal Al-Daulah(7) 1; 99-113. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5329/pdf]

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>. Diakses pada 3 Mei 2019.

⁹ Baca Hosen, Nadirsyah. 2018. “Islam Yes Khilafah No!”. Yogyakarta: Sukapress.

¹⁰ Mengenai Wahabisme, baca Maskumambang, Muhammad Faqih. 2016. *Menolak Wahabi: Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi: dari Ibnu Taimiyah hingga Abdul Qadir At-Tilimsani*. Bogor: Sahifa.

dilakukan oleh kelompok FPI. Fokus FPI pada penegakan *nahi munkar* dengan abai terhadap *amar maruf* pada akhirnya memisahkan mereka sendiri dengan simpati golongan non-muslim.

Sayangnya, di Arab Saudi sendiri, setelah bergantinya trah kerajaan pada Muhammad bin Salman, Arab Saudi mengalami pergeseran bentuk wajah yang cukup signifikan. Dibawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, Arab Saudi menjelma menjadi negara islam yang lebih moderat. Ia memperbolehkan perempuan mengemudikan kendaraan, menonton sepakbola di stadion, dan kembali digelar konser musik. Untuk pertama kalinya, penyanyi kondang Arab: Kadzim Saher dan Cheb Khaled akan menghadiri konser musik di Jeddah dan Riyadh.

Tidak hanya itu, Muhammad bin Salman juga menangkap ribuan ulama dan khatib Jumat yang mendakwahkan kekerasan: ekstremisme dan terorisme. Fatwa terbaru ulama berpengaruh di Arab Saudi, yaitu umat Islam dibolehkan melaksanakan salat di gereja. Bahkan, ulama tersebut juga mengutip Sirah Nabi Muhammad SAW tentang umat Kristen Bani Najran yang diperkenankan Nabi untuk melakukan kebaktian di Masjid Madinah. Muhammad bin Salman ingin membuktikan bahwa "Arab Saudi Jaman Now" akan sangat berbeda dengan "Arab Saudi Jaman Old"¹¹. Artinya, lagi-lagi, satu Lembaga telah kehilangan referensi kokohnya dalam rangka penegakan syariat Islam di Indonesia.

PENUTUP

Penegakan Islam sebagai sebuah konsep politik dan sendi utama dalam ketatanegaraan menurut hemat penulis

pada dasarnya telah final. Hal ini dibuktikan dari bagaimana negara, mengatur seluruh rukun-rukun keagamaan mulai dari penentuan tanggal hisab Ramadhan, pengurusan pernikahan oleh Kantor Kementerian Agama, haji yang diatur oleh pemerintah, hingga pengumpulan zakat oleh Badan Amil. Perbankan Syariah pun dilindungi oleh negara beriringan dengan bank konvensional. Jika terdapat instrument-instrumen yang dianggap belum dipenuhi, maka kemudian timbul pertanyaan, ada upaya apa dibalik "pemaksaan" instrument-instrumen tersebut.

Di sisi lain, kelompok Islam moderat yang digawangi oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta beberapa ormas-ormas Islam lainnya yang secara historis memiliki andil besar dalam pergolakan pemikiran Islam seperti Persatuan Islam (Persis), Syarikat Islam, Al-Irsyad dan lain sebagainya, pada dasarnya memiliki pedoman prinsipil yang selangkah lebih maju ketimbang ideologi-ideologi *import* yang terkesan keras dan gersang. Walaupun sulit menampik bahwa masih ada anggota dari ormas-ormas tersebut yang menyebrang pada kelompok Tarbiyah serta organisasi Islam trans-nasional lainnya, namun hal tersebut bukanlah representasi resmi sikap Lembaga dan jumlahnya tidak massif.

Khusus untuk NU dan Muhammadiyah, keduanya kini memiliki dasar kuat dalam menjaga distorsi yang disebabkan oleh guncangan dari luar. Dengan jargon islam nusantara yang diusung NU, serta islam modern yang diusung Muhammadiyah, keduanya menjadi *platform* mapan tentang gerakan Islam Indonesia yang mengedepankan keterbukaan pikiran, toleran, luwes, tanpa meninggalkan syariat-syariat pendahulunya yang *sanad* nya kembali pada islam *rahmatan lil alamin* yang

¹¹ Zuhairi Misrawi, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3739039/mesranya-hubungan-arab-saudi-israel>. Diakses pada 3 Mei 2019

diusung oleh Muhammad SAW. Kelompok Islam Indonesia sudah tidak sepatutnya lagi mencari referensi di negara-negara yang dianggap sumber Islam karena Indonesia telah memiliki pondasi yang kuat, yakni bersandingnya nasionalisme dan Islam secara seirama, tanpa harus satu ideologi menindih ideologi lainnya.

Artinya, Indonesia, dengan penduduk yang hampir 89% memeluk agama Islam, sudah tidak memerlukan kembali formula-formula simbolik yang justru malah memisahkan rahmat dari sikap masing-masing umat. Upaya penegakan secara tegas tanpa bobot argumen yang kuat pada prosesnya kemudian dapat membangun situasi tidak kondusif seperti halnya yang dialami negara-negara teluk serta sebagian negara afrika utara yang tidak stabil. Adanya NU dan Muhammadiyah serta seluruh ormas islam moderat lainnya, jelas merupakan potensi yang perlu Indonesia pertahankan agar Indonesia terhindar dari disintegrasi serta krisis berkepanjangan yang telah dialami oleh negara-negara yang dianggap Islami di ujung barat benua Asia dan utara Afrika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. “*Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional serta Implikasinya terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*”. *Journal of Governance Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. (2) 1; 126-145. [<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2124>].
- Azman, “*Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*”. *Jurnal Al-Daulah* (7) 1; 99-113. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/5329/pdf]
- Bubalo, Anthony. Fealy, Greg. & Whit Mason. 2012. *PKS & Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, & Turki*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hosen, Nadirsyah. 2018. “*Islam Yes Khilafah No!*”. Yogyakarta: Sukapress.
- Kuntowijoyo. 2017. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2018. *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*. Yogyakarta: Bunyan.
- _____. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*. Bandung: Mizan.
- Maskumambang, Muhammad Faqih. 2016. *Menolak Wahabi: Membongkar Penyimpangan Sekte Wahabi: dari Ibnu Taimiyah hingga Abdul Qadir At-Tilimsani*. Bogor: Sahifa.
- Muttaqien, 2015. “*Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional, dan Global*. *Jurnal Global Strategis Universitas Airlangga*. (9) 2; 262-276. [<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs0ebb4483e02full.pdf>].
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam & Tatanegara*. Jakarta: UI Press.
- Sobary, Muhammad. 2010. *NU & Keindonesiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Suminto, Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Zulkarnen. 2017. “*Budaya Timur Tengah Pasca Arab Spring (Analisis Deskriptif Budaya Arab)*” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. (4) 2; 72-78. [<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/download/260/245>].